

ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS *WEBSITE* PADA PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI

Nuansa Gilang Insani

INTISARI

Sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan *good governance*, transparansi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyajikan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan daerahnya di dalam *website* resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di Sulawesi dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing *website* resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.

Hasil penelitian menunjukkan baik untuk tahun 2015 maupun 2016 indeks tertinggi diraih Provinsi Gorontalo, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemerintah daerah dengan indeks terendah. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi masih rendah. Dari total skor seharusnya 100%, rata-rata yang diperoleh hanya sebesar 11,15% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,50% di tahun 2016. Hasil pengkategorian menurut *Open Budget Index (OBI)* menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Sulawesi baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (*insufficient*) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Sulawesi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum.

Secara umum pemerintah daerah di Sulawesi dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, total aset pemerintah daerah yang lebih besar, jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, total belanja daerah yang lebih besar, opini audit yang lebih baik, tingkat kompetisi politik yang lebih tinggi, IPM yang lebih tinggi dan *press visibility* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Sulawesi yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

Kata Kunci: **Transparansi, *Good Governance*, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah.**

PENDAHULUAN

Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik atau *good governance* ditandai dengan karakteristik-karakteristik seperti *transparency*, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *efficiency*, *effectiveness* dan *accountability*. Upaya untuk meningkatkan transparansi telah dilakukan pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Terkait pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan *content menu* TPAD dalam *website* resmi pemerintah daerah beserta dokumen-dokumen apa saja yang harus disediakan di dalamnya.

Akan tetapi, hal tersebut masih jauh dari harapan. Sofia dan Husen (2013) mengungkapkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih belum memasukkan fitur informasi keuangan dalam *website*-nya. Ini menunjukkan meskipun berbagai peraturan perundangan terkait kewajiban mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dan dokumen

apa saja yang perlu diungkapkan telah ditetapkan, belum seluruh pemerintah daerah bersedia dan mampu mengimplementasikannya. Salah satu penyebabnya ialah hingga saat ini pemerintah pusat belum pernah melakukan pengukuran dan pemeringkatan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketaatan terhadap peraturan perundangan tersebut. Tanpa adanya pengukuran dan pemeringkatan, pemerintah daerah cenderung mengabaikan arti penting transparansi dan tidak memiliki semangat berkompetisi untuk menjadi lebih baik dalam hal transparansi pengelolaan keuangan.

Melihat fakta yang ada, penelitian terkait pengukuran dan pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tingkat pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian akan dilakukan pada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi melalui dokumentasi *website*. Sulawesi dipilih sebagai objek penelitian karena hingga saat ini belum ada peneliti yang melakukan penelitian sejenis dengan Sulawesi sebagai objeknya. Selain itu, sebagai daerah di luar Pulau Jawa umumnya cenderung tertinggal pada beberapa aspek pemerintahan. Hermana *et al.* (2012) mengungkapkan terdapat indikasi kesenjangan digital antara daerah Jawa dengan daerah di luar Jawa. Berdasarkan penilaian yang dilakukan Syamsul (2017), seluruh

pemerintah provinsi di Sulawesi juga menunjukkan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak cukup (*insufficient*).

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajemen perusahaan sebagai agen. Agen merupakan pihak yang dikontrak oleh prinsipal untuk bekerja demi kepentingan prinsipal. Pada sektor publik hubungan keagenan terjadi di antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Hubungan kontrak yang terbentuk berfokus pada bagaimana pemerintah sebagai penerima amanah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selaku pemberi amanah.

Dalam Gudono (2014) dijelaskan bahwa teori keagenan dibangun untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul saat terdapat ketidaklengkapan informasi ketika prinsipal dan agen melakukan kontrak. Teori keagenan memprediksi bahwa jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan prinsipal serta kepentingan agen dan prinsipal berbeda, akan terjadi *principal-agent problem*, yaitu agen dapat melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya tetapi merugikan prinsipal. Permasalahan ketidakseimbangan penguasaan informasi antara agen dan prinsipal (*information asymmetry*) terjadi juga

pada sektor publik. Menurut Attila (2012) ketika prinsipal mengoptimalkan pengawasannya serta dapat memperoleh data yang penting dan relevan dari agen, permasalahan asimetri informasi dapat berkurang.

b. Definisi dan Karakteristik *Good Governance*

Sari (2013) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domainnya yaitu negara, sektor privat dan masyarakat. World Bank (1994) merumuskan empat elemen *good governance* yang terdiri dari manajemen sektor publik, akuntabilitas, kerangka hukum untuk pembangunan serta transparansi dan informasi. Di sisi lain ADB (1995) menggambarkan *good governance* dalam empat elemen juga yaitu akuntabilitas, partisipasi, dapat diprediksi dan transparansi.

c. Transparansi

Werimon *et al.* (2007) mengartikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Sari (2012) menjelaskan bahwa transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Jo dan Kim (2007) berargumen bahwa frekuensi pengungkapan informasi pada periode

yang lebih banyak dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi.

Sebagai salah satu aspek dari *e-government*, *website* yang berbasis internet kemudian menjadi salah satu bentuk portal informasi untuk mewujudkan transparansi dan memberikan pelayanan publik. Styles dan Tennyson (2007) mengungkapkan bahwa internet merupakan sarana yang paling mudah dan murah bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi, termasuk informasi tentang laporan keuangannya.

d. Pengelolaan Keuangan Daerah

Huwae (2016) mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai pengelolaan APBD yang dinilai dengan uang yang kegiatannya dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan yang harus dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta taat kepada peraturan dan bermanfaat untuk masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengartikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

e. Penelitian Sebelumnya

Hermana *et al.* (2012), Martani *et al.* (2014) dan Nusantari (2016) telah mencoba melakukan penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, tetapi ketiga penelitian tersebut belum secara komprehensif mengukur dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Keterbatasan tersebut kemudian diperbaiki Huwae (2016) yang menyusun 29 indikator pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah dan mengukur dengan satu kriteria yaitu ketersediaan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah. Penelitian Huwae (2016) selanjutnya dilengkapi dan diadaptasi oleh Syamsul (2017) dengan menggunakan tiga kriteria pengukuran, yaitu ketersediaan, aksesibilitas dan ketepatan waktu pengungkapan untuk mengukur tingkat transparansi pada tiga tahapan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, tetapi penelitian tersebut hanya dilakukan pada pemerintah provinsi di Indonesia saja.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian akan dilakukan dalam bentuk dokumentasi data *website* untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah seluruh pemerintah daerah di Sulawesi, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Objek penelitian ini ialah *website* resmi

pemerintah daerah di Sulawesi yang akan dinilai transparansi pengelolaan keuangan daerahnya dengan melihat data, informasi dan dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam *website* tersebut. Terdapat 87 pemerintah daerah yang terdiri dari enam pemerintah provinsi dan 81 pemerintah kabupaten/kota

a. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016. Sumber data sekunder diperoleh dari *website* resmi pemerintah daerah se-Sulawesi. Selain itu, data sekunder lain yang dibutuhkan ialah informasi yang terkait dengan karakteristik pemerintah daerah di Sulawesi yang memiliki tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dan terendah. Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara dokumentasi.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data disini akan dilakukan dalam dua tahapan utama yaitu untuk menilai tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dan untuk mengidentifikasi karakteristik pemerintah daerah dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah yang tertinggi dan terendah.

Penilaian Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disusun Huwae (2016), yaitu dengan melihat penyajian 29 indikator dalam *website* resmi pemerintah daerah. Ke-29 indikator tersebut merupakan informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.

Untuk tahap perencanaan terdapat 10 indikator yang terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja Anggaran SKPD dan PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, serta ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan PPKD.

Pada tahap pelaksanaan terdapat sembilan indikator yang meliputi informasi Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Realisasi Pembiayaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Rencana Kerja Anggaran Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan, dan SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban digunakan 10 indikator untuk penilaian tahun 2015 yaitu Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015. Untuk penilaian tahun 2016, hanya digunakan delapan indikator. Hal tersebut dikarenakan pada saat akhir pengamatan *website*, belum seluruh pemerintah daerah dapat menyajikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016.

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan informasi, dan frekuensi pengungkapan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan berarti informasi pengelolaan keuangan daerah yang diukur tersedia atau disajikan dalam *website* resmi pemerintah daerah. Aksesibilitas menunjukkan informasi pengelolaan keuangan daerah yang tersedia dalam *website* resmi

pemerintah daerah dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat.

Ketepatan waktu dinilai berdasarkan perbandingan tanggal unggah pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi pengelolaan keuangan daerah dengan tanggal penetapan sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan (Syamsul, 2017). Dalam penelitian ini, rentang waktu yang dipersyaratkan adalah 30 hari setelah dokumen pengelolaan keuangan daerah ditetapkan. Frekuensi pengungkapan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan tersedianya informasi transparansi pengelolaan keuangan daerah per indikator dalam runtut waktu tertentu. Runtut waktu yang ditetapkan dalam penelitian ini ialah tiga tahun ke belakang dengan batas akhir tahun 2012 dengan pertimbangan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) baru ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2012.

Pengukuran kelengkapan kriteria transparansi sebagaimana disebutkan di atas dilakukan untuk memperoleh indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Pengukuran menggunakan skor dikotomi. Jika item tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu, diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria. Jika tidak tersedia, tidak dapat diakses (diunduh), dan tidak

tepat waktu, diberi nilai 0. Untuk kriteria frekuensi pengungkapan apabila item tidak tersedia akan diberi nilai 0, apabila item tersedia dalam satu tahun akan diberi nilai sepertiga, item tersedia dalam dua tahun akan diberi nilai dua per tiga sedangkan apabila item tersedia dalam tiga tahun berturut-turut akan diberi nilai 1.

- 2) Skor yang diperoleh untuk masing-masing kriteria dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria yaitu 0,25.
- 3) Skor yang diperoleh setiap indikator selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap pemerintah daerah.
- 4) Indeks transparansi dihitung dengan

cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh setiap indikator.

- 5) Setelah indeks transparansi diketahui, selanjutnya seluruh pemerintah daerah tersebut diperingkat dengan membandingkan tingkat transparansinya masing-masing.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah kemudian diperingkat berdasarkan pada *Open Budget Index* (OBI) yang merupakan kategori peringkat yang digunakan International Budget Partnership (IBP). Tingkat kategori keterbukaan informasi anggaran berdasarkan OBI ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

No.	Tingkat Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor
1	Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif (<i>Extensive</i>)	81-100
		Substansial (<i>Substansial</i>)	61-80
2	Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)	Terbatas (<i>Limited</i>)	41-60
		Minimal (<i>Minimal</i>)	21-40
		Sedikit (<i>Scant or None</i>)	0-20

Sumber: IBP (2015)

Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Daerah dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah

Pengidentifikasian dilakukan pada tiga pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan tiga pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah. Untuk pemerintah provinsi yang masuk dalam peringkat tiga tertinggi ataupun tiga

terendah, tidak dilakukan pengidentifikasian, karena secara umum pemerintah provinsi memiliki kondisi pemerintahan yang berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak dapat dibandingkan. Pengidentifikasian dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan mencari data dan informasi terkait kondisi pemerintah kabupaten/kota yang relevan dengan penilaian

transparansi pengelolaan keuangan daerah.

c. Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, metode yang akan digunakan ialah pengecekan berulang kali dan *peer debriefing*. Pengecekan berulang kali dilakukan terhadap *website* resmi pemerintah daerah selama tanggal penelitian. Untuk *peer debriefing*, Creswell (2014) menjelaskannya sebagai menggunakan orang lain untuk membantu menelaah dan melakukan tanya jawab mengenai penelitian sehingga pemahamannya selaras dengan peneliti. *Peer debriefer* dalam penelitian ini mahasiswa Universitas Gadjah Mada program Magister Akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penilaian Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdapat 87 pemerintah daerah di Sulawesi yang menjadi objek penelitian ini, tetapi hanya 75 pemerintah daerah yang *website*-nya aktif dan dapat dilakukan analisis. Untuk pemerintah daerah yang tidak memiliki *website* resmi, atau memiliki tetapi tidak dapat diakses dan sedang dalam perbaikan, tidak dilakukan penilaian karena tidak dapat diukur dan dibandingkan. Untuk pemeringkatannya pemerintah daerah tersebut akan diletakkan pada peringkat terbawah, di bawah pemerintah daerah yang memiliki *website* dengan nilai terendah, dan diberi label “Tidak

Transparan”. Hasil penilaian tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 dibahas sebagai berikut.

Hasil Penilaian untuk Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan hasil penilaian, nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi untuk tahun anggaran 2015 diraih Provinsi Gorontalo dengan skor total 14,83 dari skor maksimal 29 atau dengan indeks 51,15% dari total 100%. Sementara itu, nilai terendah diperoleh oleh Kabupaten Mamuju Tengah dengan skor total 0,00 dari skor maksimal 29 atau dengan indeks 0,00% dari total 100%.

Apabila dilihat dari tahap pengelolaan keuangan daerah, tahap yang paling banyak dipenuhi oleh 75 pemerintah daerah yang dapat ditelusuri *website*-nya ialah tahap pelaksanaan dengan rata-rata skor sebesar 1,84. Selanjutnya, tahap yang paling sedikit dipenuhi ialah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan rata-rata skor pemenuhan sebesar 0,60. Hasil penilaian tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Nama Pemerintah Daerah	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks (%)
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
1	Provinsi Gorontalo	5.00	5.83	4.00	14.83	51.15
2	Kota Parepare	5.67	4.58	2.42	12.67	43.68
3	Kota Makassar	2.58	4.50	3.75	10.83	37.36
4	Provinsi Sulawesi Tengah	2.75	4.92	2.42	10.08	34.77
5	Kabupaten Gorontalo	4.50	2.58	1.58	8.67	29.89
6	Kabupaten Gowa	2.00	4.67	1.75	8.42	29.02
7	Kabupaten Maros	2.17	3.75	2.25	8.17	28.16
8	Kota Kendari	3.75	3.00	1.17	7.92	27.30
9	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3.50	2.75	1.50	7.75	26.72
10	Kabupaten Majene	2.67	3.58	1.08	7.33	25.29
11	Kabupaten Bulukumba	3.00	2.83	1.17	7.00	24.14
12	Kabupaten Buton	0.17	3.25	2.75	6.17	21.26
13	Kota Tomohon	0.50	3.17	2.50	6.17	21.26
14	Provinsi Sulawesi Barat	1.33	3.17	1.33	5.83	20.11
15	Provinsi Sulawesi Utara	1.83	3.33	0.67	5.83	20.11
16	Kabupaten Takalar	0.00	3.83	1.75	5.58	19.25
17	Kabupaten Sidenreng Rappang	0.00	3.33	1.58	4.92	16.95
18	Kota Palopo	2.58	1.83	0.17	4.58	15.80
19	Kabupaten Sigi	0.50	3.25	0.75	4.50	15.52
20	Kabupaten Bone	0.50	3.00	0.83	4.33	14.94
21	Kota Gorontalo	0.50	2.25	1.33	4.08	14.08
22	Kabupaten Bantaeng	0.00	3.17	0.75	3.92	13.51
23	Kabupaten Barru	0.92	2.50	0.50	3.92	13.51
24	Kabupaten Bone Bolango	0.00	3.08	0.75	3.83	13.22
25	Kabupaten Parigi Moutong	2.08	1.33	0.42	3.83	13.22
26	Kabupaten Minahasa Utara	0.00	3.17	0.58	3.75	12.93
27	Provinsi Sulawesi Selatan	0.50	2.42	0.75	3.67	12.64
28	Kabupaten Banggai Kepulauan	0.00	2.83	0.67	3.50	12.07
29	Kabupaten Sinjai	1.58	1.33	0.25	3.17	10.92
30	Kabupaten Banggai	0.83	1.50	0.50	2.83	9.77
31	Kabupaten Pohuwato	0.08	1.92	0.50	2.50	8.62
32	Kabupaten Wakatobi	0.58	1.17	0.67	2.42	8.33
33	Kabupaten Boalemo	0.50	1.58	0.25	2.33	8.05
34	Kota Manado	1.17	1.00	0.00	2.17	7.47
35	Kabupaten Kolaka	0.58	1.33	0.17	2.08	7.18
36	Kabupaten Pinrang	1.25	0.83	0.00	2.08	7.18
37	Kabupaten Tana Toraja	1.00	0.92	0.00	1.92	6.61

No.	Nama Pemerintah Daerah	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks (%)
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
38	Kabupaten Luwu Timur	0.67	1.08	0.08	1.83	6.32
39	Kabupaten Kolaka Utara	0.17	1.67	0.00	1.83	6.32
40	Kabupaten Buton Utara	1.00	0.83	0.00	1.83	6.32
41	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0.17	1.33	0.25	1.75	6.03
42	Kabupaten Bombana	0.50	1.00	0.00	1.50	5.17
43	Kabupaten Muna	0.00	0.92	0.50	1.42	4.89
44	Kabupaten Polewali Mandar	0.50	0.92	0.00	1.42	4.89
45	Kabupaten Wajo	0.00	1.08	0.25	1.33	4.60
46	Kabupaten Luwu Utara	0.00	1.25	0.08	1.33	4.60
47	Kabupaten Mamuju Utara	0.00	0.83	0.25	1.08	3.74
48	Kota Bau-Bau	0.00	1.08	0.00	1.08	3.74
49	Kabupaten Donggala	0.00	1.00	0.00	1.00	3.45
50	Kabupaten Konawe Selatan	0.00	1.00	0.00	1.00	3.45
51	Kota Bitung	0.00	1.00	0.00	1.00	3.45
52	Kota Kotamobagu	0.00	1.00	0.00	1.00	3.45
53	Kota Palu	0.00	1.00	0.00	1.00	3.45
54	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0.00	0.92	0.00	0.92	3.16
55	Kabupaten Enrekang	0.00	0.92	0.00	0.92	3.16
56	Kabupaten Konawe	0.00	0.92	0.00	0.92	3.16
57	Kabupaten Poso	0.00	0.92	0.00	0.92	3.16
58	Kabupaten Buol	0.08	0.83	0.00	0.92	3.16
59	Kabupaten Kepulauan Sangihe	0.08	0.83	0.00	0.92	3.16
60	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
61	Kabupaten Kepulauan Selayar	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
62	Kabupaten Kepulauan Talaud	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
63	Kabupaten Kolaka Timur	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
64	Kabupaten Luwu	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
65	Kabupaten Mamasa	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
66	Kabupaten Mamuju	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
67	Kabupaten Morowali	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
68	Kabupaten Minahasa Selatan	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
69	Kabupaten Minahasa Tenggara	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
70	Kabupaten Soppeng	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
71	Kabupaten Tojo Una-Una	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87
72	Provinsi Sulawesi Tenggara	0.00	0.83	0.00	0.83	2.87

No.	Nama Pemerintah Daerah	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks (%)
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
73	Kabupaten Morowali Utara	0.00	0.75	0.00	0.75	2.59
74	Kabupaten Banggai Laut	0.00	0.25	0.25	0.50	1.72
75	Kabupaten Mamuju Tengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rata-Rata	0.80	1.84	0.60	3.23	11.15
76	Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	-	tidak transparan	
77	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	-	-	-	tidak transparan	
78	Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	-	tidak transparan	
79	Kabupaten Jeneponto	-	-	-	tidak transparan	
80	Kabupaten Konawe Utara	-	-	-	tidak transparan	
81	Kabupaten Minahasa	-	-	-	tidak transparan	
82	Kabupaten Tolitoli	-	-	-	tidak transparan	
83	Kabupaten Toraja Utara	-	-	-	tidak transparan	
84	Kabupaten Buton Selatan	-	-	-	tidak transparan	
85	Kabupaten Buton Tengah	-	-	-	tidak transparan	
86	Kabupaten Konawe Kepulauan	-	-	-	tidak transparan	
87	Kabupaten Muna Barat	-	-	-	tidak transparan	

Langkah selanjutnya ialah mengategorikan tingkat keterbukaan informasi pemerintah daerah berdasar indeks yang diperoleh. Pengkategorian tersebut dilakukan berdasarkan *Open Budget Index* (OBI). Berdasarkan hasil pengkategorian diketahui bahwa belum ada pemerintah daerah yang tergolong dalam tingkat keterbukaan anggaran Cukup (*Sufficient*), baik dalam kategori Ekstensif (*Ekstensive*) maupun Substansial (*Substantial*). Ke-75 pemerintah daerah di Sulawesi berada pada tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup (*Insufficient*) dengan rincian dua pemerintah daerah (Provinsi Gorontalo dan Kota Parepare) tergolong dalam kategori Terbatas (*Limited*), 11

pemerintah daerah (Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kota Kendari, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Majene, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Buton dan Kota Tomohon) termasuk dalam kualifikasi Minimal (*Minimal*) dan 62 pemerintah daerah lainnya tergolong dalam kualifikasi sedikit (*Scant or None*). Hasil pengkategorian tingkat keterbukaan informasi anggaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor	Nama Pemerintah Daerah
1	Cukup (Sufficient)	Ekstensif (Extensive)	81-100	-
		Substansial (Substantial)	61-80	-
2	Tidak Cukup (Insufficient)	Terbatas (Limited)	41-60	Provinsi Gorontalo dan Kota Parepare.
		Minimal (Minimal)	21-40	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kota Kendari, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Majene, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Buton dan Kota Tomohon.
		Sedikit (Scant or None)	0-20	Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Palopo, Kabupaten Sigi, Kabupaten Bone, Kota Gorontalo, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Boalemo, Kota Manado, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Mamuju Utara, Kota Baubau, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Konawe, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Luwu, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Morowali, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Hasil Penilaian untuk Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan hasil penilaian, nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi untuk tahun anggaran 2016, kembali diraih Provinsi Gorontalo dengan skor total 10,92 dari skor maksimal 27,00 atau dengan indeks 40,43% dari total 100%. Sementara itu, nilai terendah juga diperoleh oleh Kabupaten Mamuju Tengah dengan skor total 0,75 dari skor maksimal 27,00 atau dengan indeks 2,78% dari total 100%.

Apabila dilihat dari tahap pengelolaan keuangan daerah, tahap yang paling banyak dipenuhi oleh 75 pemerintah daerah yang dapat ditelusuri *website*-nya ialah tahap pelaksanaan dengan rata-rata skor sebesar 1,39. Selanjutnya, tahap yang paling sedikit dipenuhi ialah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan rata-rata skor pemenuhan sebesar 0,26. Hasil penilaian tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Nama Pemerintah Daerah	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks (%)
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
1	Provinsi Gorontalo	5.25	4.08	1.58	10.92	40.43
2	Kota Parepare	5.42	2.17	1.50	9.08	33.64
3	Kabupaten Gorontalo	4.50	2.42	0.92	7.83	29.01
4	Provinsi Sulawesi Tengah	2.58	3.25	0.83	6.67	24.69
5	Kota Makassar	2.00	2.08	1.50	5.58	20.68
6	Kabupaten Maros	2.17	2.42	0.50	5.08	18.83
7	Provinsi Sulawesi Barat	1.33	2.50	1.00	4.83	17.90
8	Kabupaten Mamuju	2.50	2.25	0.00	4.75	17.59
9	Kabupaten Buton Utara	0.17	3.17	0.75	4.08	15.12
10	Kabupaten Sidenreng Rappang	1.50	1.42	0.92	3.83	14.20
11	Kota Kendari	1.42	1.83	0.50	3.75	13.89
12	Kota Tomohon	0.08	2.33	0.83	3.25	12.04
13	Kabupaten Majene	1.00	1.75	0.50	3.25	12.04
14	Kota Gorontalo	1.25	1.42	0.42	3.08	11.42
15	Kabupaten Takalar	1.00	1.67	0.33	3.00	11.11
16	Kabupaten Bulukumba	0.50	1.67	0.67	2.83	10.49
17	Kabupaten Sinjai	0.83	1.83	0.17	2.83	10.49
18	Kabupaten Bone	0.58	1.83	0.33	2.75	10.19
19	Kota Palopo	1.50	1.17	0.08	2.75	10.19
20	Provinsi Sulawesi Selatan	0.08	1.58	1.08	2.75	10.19
21	Kabupaten Gowa	0.33	1.67	0.67	2.67	9.88
22	Kabupaten Pinrang	1.67	0.92	0.00	2.58	9.57
23	Provinsi Sulawesi Utara	0.58	1.67	0.33	2.58	9.57

No.	Nama Pemerintah Daerah	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks (%)
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
24	Kabupaten Bone Bolango	0.50	1.17	0.83	2.50	9.26
25	Kabupaten Soppeng	1.00	1.42	0.00	2.42	8.95
26	Kabupaten Parigi Moutong	0.42	1.42	0.42	2.25	8.33
27	Kabupaten Barru	0.83	1.25	0.08	2.17	8.02
28	Kabupaten Banggai	0.42	1.33	0.33	2.08	7.72
29	Kabupaten Wakatobi	0.67	1.17	0.25	2.08	7.72
30	Kabupaten Pohuwato	0.58	1.33	0.17	2.08	7.72
31	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0.58	1.25	0.17	2.00	7.41
32	Kabupaten Banggai Kepulauan	0.00	1.67	0.25	1.92	7.10
33	Kabupaten Luwu Timur	0.67	1.17	0.08	1.92	7.10
34	Kabupaten Minahasa Utara	0.00	1.75	0.08	1.83	6.79
35	Kabupaten Kolaka	0.50	1.17	0.08	1.75	6.48
36	Kota Palu	0.75	1.00	0.00	1.75	6.48
37	Kabupaten Buton	0.17	1.25	0.25	1.67	6.17
38	Kabupaten Banggai Laut	0.50	1.00	0.17	1.67	6.17
39	Kabupaten Tana Toraja	0.67	1.00	0.00	1.67	6.17
40	Kota Manado	0.67	1.00	0.00	1.67	6.17
41	Kabupaten Boalemo	0.08	1.25	0.17	1.50	5.56
42	Kabupaten Sigi	0.08	1.33	0.08	1.50	5.56
43	Kabupaten Tojo Una-Una	0.00	1.42	0.00	1.42	5.25
44	Kabupaten Kepulauan Sangihe	0.50	0.92	0.00	1.42	5.25
45	Kabupaten Mamasa	0.50	0.92	0.00	1.42	5.25
46	Kabupaten Bantaeng	0.00	1.25	0.08	1.33	4.94
47	Kabupaten Luwu Utara	0.00	1.25	0.08	1.33	4.94
48	Kabupaten Wajo	0.00	1.17	0.17	1.33	4.94
49	Kabupaten Kolaka Utara	0.00	1.25	0.00	1.25	4.63
50	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0.17	1.08	0.00	1.25	4.63
51	Kabupaten Mamuju Utara	0.00	0.92	0.17	1.08	4.01
52	Kabupaten Muna	0.00	1.00	0.08	1.08	4.01
53	Kota Bau-Bau	0.00	1.08	0.00	1.08	4.01
54	Kabupaten Bombana	0.08	1.00	0.00	1.08	4.01
55	Kabupaten Polewali Mandar	0.08	1.00	0.00	1.08	4.01
56	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0.00	1.00	0.00	1.00	3.70
57	Kabupaten Donggala	0.00	1.00	0.00	1.00	3.70
58	Kabupaten Konawe	0.00	1.00	0.00	1.00	3.70
59	Kabupaten Konawe Selatan	0.00	1.00	0.00	1.00	3.70

No.	Nama Pemerintah Daerah	Skor Per Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah			Total	Indeks (%)
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
60	Kabupaten Poso	0.00	1.00	0.00	1.00	3.70
61	Kota Bitung	0.00	1.00	0.00	1.00	3.70
62	Kota Kotamobagu	0.00	1.00	0.00	1.00	3.70
63	Kabupaten Buol	0.08	0.92	0.00	1.00	3.70
64	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
65	Kabupaten Enrekang	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
66	Kabupaten Kepulauan Selayar	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
67	Kabupaten Kepulauan Talaud	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
68	Kabupaten Kolaka Timur	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
69	Kabupaten Luwu	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
70	Kabupaten Minahasa Selatan	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
71	Kabupaten Minahasa Tenggara	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
72	Kabupaten Morowali	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
73	Provinsi Sulawesi Tenggara	0.00	0.92	0.00	0.92	3.40
74	Kabupaten Morowali Utara	0.00	0.83	0.00	0.83	3.09
75	Kabupaten Mamuju Tengah	0.00	0.75	0.00	0.75	2.78
	Rata-Rata	0.65	1.39	0.26	2.29	8.50
76	Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	-	tidak transparan	
77	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	-	-	-	tidak transparan	
78	Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	-	tidak transparan	
79	Kabupaten Jeneponto	-	-	-	tidak transparan	
80	Kabupaten Konawe Utara	-	-	-	tidak transparan	
81	Kabupaten Minahasa	-	-	-	tidak transparan	
82	Kabupaten Tolitoli	-	-	-	tidak transparan	
83	Kabupaten Toraja Utara	-	-	-	tidak transparan	
84	Kabupaten Buton Selatan	-	-	-	tidak transparan	
85	Kabupaten Buton Tengah	-	-	-	tidak transparan	
86	Kabupaten Konawe Kepulauan	-	-	-	tidak transparan	
87	Kabupaten Muna Barat	-	-	-	tidak transparan	

Sama seperti penilaian untuk tahun anggaran 2015, langkah selanjutnya ialah mengategorikan tingkat keterbukaan informasi pemerintah daerah berdasar indeks yang diperoleh

dengan menggunakan *Open Budget Index* (OBI). Hasil pengkategorian tingkat keterbukaan informasi anggaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor	Nama Pemerintah Daerah
1	Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif (<i>Extensive</i>)	81-100	-
		Substansial (<i>Substantial</i>)	61-80	-
2	Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)	Terbatas (<i>Limited</i>)	41-60	-
		Minimal (<i>Minimal</i>)	21-40	Provinsi Gorontalo, Kota Parepare, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Makassar.
		Sedikit (<i>Scant or None</i>)	0-20	Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Barat, Kota Kendari, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Majene, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Buton, Kota Tomohon, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sigi, Kabupaten Bone, Kota Gorontalo, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Boalemo, Kota Manado, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Mamuju Utara, Kota Baubau, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Konawe, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Luwu, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Morowali, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan hasil pengkategorian keterbukaan anggaran Cukup diketahui bahwa belum ada pemerintah (*Sufficient*), baik dalam kategori daerah yang tergolong dalam tingkat Ekstensif (*Ekstensive*) maupun

Substansial (*Substantial*). Ke-75 pemerintah daerah di Sulawesi berada pada tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup (*Insufficient*), dengan rincian tidak ada pemerintah daerah yang tergolong dalam kategori Terbatas (*Limited*), lima pemerintah daerah (Provinsi Gorontalo, Kota Parepare, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Makassar) termasuk dalam kategori Minimal (*Minimal*), sedangkan sisanya, sebanyak 70 pemerintah daerah tergolong dalam kategori Sedikit (*Scant or None*).

b. Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Daerah dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah

Pengidentifikasian bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang membedakan pemerintah daerah yang memperoleh predikat tertinggi dan terendah. Pengidentifikasian dilakukan pada tiga pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan tiga pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah. Untuk pemerintah provinsi yang masuk dalam peringkat tiga tertinggi ataupun tiga terendah, tidak dilakukan pengidentifikasian, karena secara umum pemerintah provinsi memiliki kondisi pemerintahan yang berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak dapat dibandingkan.

Tiga pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi untuk tahun anggaran 2015 ialah Kota

Parepare, Kota Makassar dan Kabupaten Gorontalo, sedangkan tiga pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah ialah Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk tahun anggaran 2016, tiga pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi ditempati oleh Kota Parepare, Kabupaten Gorontalo dan Kota Makassar, sedangkan tiga pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah ialah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena sebagian besar pemerintah kabupaten/kota yang diidentifikasi karakteristiknya sama antara tahun anggaran 2015 dan 2016, pembahasan mengenai pengidentifikasian karakteristik tersebut dijadikan satu..

Dapat disimpulkan bahwa tiga pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, total aset pemerintah daerah yang lebih besar, jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, total belanja daerah yang lebih besar, opini audit yang lebih baik, tingkat kompetisi politik yang lebih tinggi, IPM yang lebih tinggi dan *press visibility* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi yang tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

Status Peringkat Transparansi	Nama Kabupaten/ Kota	Kompleksitas Pemda (Jumlah Penduduk)		Ukuran Pemda (Total Aset)		Ukuran Legislatif (Jumlah Anggota DPRD)	Umur Administratif		Kekayaan Pemda (Rasio PAD)	
		2014	2015	2014	2015	2014-2019	Penetapan	Umur	2014	2015
TERTINGGI	Kota Parepare	136,903	138,699	1,343,118,347,196.56	1,562,360,829,764.10	25	4 Juli 1959	58	0.16	0.14
	Kota Makassar	1,429,242	1,449,401	10,237,676,525,907.60	6,862,850,117,807.73	50	4 Juli 1959	58	0.28	0.28
	Kab. Gorontalo	368,149	388,014	2,123,139,507,825.14	1,244,891,074,062.10	35	4 Juli 1959	58	0.11	0.10
	Rata-Rata	644,765	658,705	4,567,978,126,976	3,223,367,340,545	37		58	0.18	0.17
TERENDAH	Kab. Morowali	111,002	113,132	2,012,134,687,866.63	1,379,334,567,352.76	25	4 Oktober 1999	18	0.05	0.09
	Kab. Morowali Utara	114,982	117,670	216,901,113,322.20	826,245,182,175.18	25	11 Mei 2013	4	0.08	0.05
	Kab. Banggai Laut	68,124	69,514	3,577,226,984.65	291,343,049,387.92	20	11 Januari 2013	4	0.03	0.03
	Kab. Mamuju Tengah	118,188	121,384	482,924,527,223.86	632,809,167,242.79	25	11 Januari 2013	4	0.02	0.02
	Rata-Rata	103,074	105,425	678,884,388,849.34	782,432,991,539.66	24		7.5	0.04	0.05

Status Peringkat Transparansi	Nama Kabupaten/ Kota	Belanja Daerah		Opini atas LKPD				Kompetisi Politik	IPM		Press Visibility
		2014	2015	2014	Skor	2015	Skor		2014	2015	
TERTINGGI	Kota Parepare	614,787,845,061.10	784,187,002,833.99	WDP	0	WTP	1	0.80	75.66	76.31	5,580
	Kota Makassar	2,605,269,843,328.35	3,061,176,650,637.25	WDP	0	WTP	1	0.84	79.35	79.94	39,100
	Kab. Gorontalo	850,537,468,838.74	995,870,912,043.45	WTP	1	WTP	1	0.89	62.90	63.63	19,000
	Rata-Rata	1,356,865,052,409.40	1,613,744,855,171.56		0.33		1.00	0.84	72.64	73.29	21,226.67
TERENDAH	Kab. Morowali	474,143,569,699.92	779,495,582,009.06	WDP	0	WTP	1	0.68	67.91	69.12	6,880
	Kab. Morowali Utara	476,566,074,307.00	690,649,889,434.36	TMP	0	TMP	0	0.80	65.81	66.00	2,560
	Kab. Banggai Laut	182,036,772,162.00	405,148,567,853.00	TMP	0	TMP	0	0.60	62.12	62.90	5,590
	Kab. Mamuju Tengah	223,858,942,027.00	464,087,301,538.00	WDP	0	WTP	1	0.56	61.48	62.22	14,700
	Rata-Rata	339,151,339,548.98	584,845,335,208.61		0.00		0.50	0.66	63.14	63.71	7,432.50

KESIMPULAN

Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Sulawesi ialah sebesar 11,15% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,50% di tahun 2016. Nilai tersebut tergolong masih sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai indeks maksimal sebesar 100%. Hasil pengkategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut *Open Budget Index* (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Sulawesi baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (*insufficient*) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Sulawesi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum.

KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

- a. Hanya dilakukan pada 87 pemerintah daerah di Sulawesi sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
- b. Penelitian ini menggunakan empat kriteria pengukuran (ketersediaan, aksesibilitas,

ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan) yang masing-masing diberi bobot yang sama yaitu 0,25 tanpa melakukan analisis mendalam untuk menentukan kriteria mana yang lebih penting. Penetapan bobot ditetapkan hanya berdasarkan asumsi penulis sendiri.

- c. Penelitian ini hanya sebatas membedakan karakteristik pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dan terendah berdasarkan kajian kepustakaan dan belum melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait hal-hal yang menyebabkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan suatu daerah tinggi atau rendah.

Atas keterbatasan-keterbatasan penelitian di atas, untuk penelitian selanjutnya disarankan:

- a. Memperbanyak pemerintah daerah yang dijadikan objek penelitian terkait penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- b. Melakukan *focus group discussion* dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah serta melakukan validitas ahli untuk menentukan bobot masing-masing kriteria secara lebih komprehensif.

- c. Melakukan penelitian lebih dalam dengan melakukan wawancara dan *focus group discussion* untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. 1995. *Governance: Sound Development Management*. Manila: Asian Development Bank.
- Attila, Gyorgy. 2012. "Agency Problems in Public Sector". Diakses pada 15 April 2017. <http://anale.steconomieceuradea.ro/volume/2012/n1/101.pdf>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2015*. Palu: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015*. Gorontalo: BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2015*. Mamuju: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015*. Palu: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015*. Makassar: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015*. Makassar: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka 2016*. Banggai: BPS Kabupaten Banggai Laut.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Gorontalo Dalam*

- Angka 2016*. Limboto: BPS Kabupaten Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2016*. Tobadak: BPS Kabupaten Mamuju Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Morowali Dalam Angka 2016*. Bungku: BPS Kabupaten Morowali.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2016*. Kolonodale: BPS Kabupaten Morowali Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Makassar Dalam Angka 2016*. Makassar: BPS Kota Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2016*. Parepare: BPS Kota Parepare.
- Cresswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Gudono. 2014. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPF.
- Hermana, B., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W. Silfianti. 2012. E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web. *3rd. International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR*. Vol. 27, pp. 194-199.
- Huwae, K. 2016. Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Tesis*. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- International Budget Partnership (IBP), 2015. "Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live." Diakses pada tanggal 20 Februari 2017. <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf>.
- Jo, Hoje dan Yongtae Kim. 2007. Disclosure Frequency and Earnings Management. *Journal of Financial Economics*. Vol. 84, No. 2, pp. 1-45.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.
- Martani, D., D. Fitriyani, dan Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol. 60, No. 3, pp. 504-516.
- Nusantari, A. N. 2016. Analisis Determinan Tingkat Transparansi Keuangan dan Pengungkapan Kinerja Website Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus

- Pulau Jawa). *Skripsi*. Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Sari, D. 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Disampaikan pada Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis 2012. Bandung. 27 Maret 2012.
- Sari, D. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten)*. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado. 25-28 September 2013.
- Sofia, A dan B. Husen. 2013. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi pada Website (Studi pada Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia). *Jurnal Media Indonesia*. Vol. 12, No. 4, pp. 297-308.
- Styles, A. K., dan Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol. 19, No. 1, pp. 56-92.
- Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Tesis*. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Werimon, S., I. Ghazali, dan M. Nasir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. 26-28 Juli 2007.
- World Bank. 1994. *Governance: The World Bank's Experience*. Washington DC: World Bank Publication